

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Memiliki kebutuhan yang hendak dicapai serta berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut merupakan hal yang wajar untuk dilakukan seorang individu dalam menjalankan kehidupannya. Upaya yang dapat dilakukan oleh individu yakni dengan bekerja. Dimana dengan melakukan suatu pekerjaan maka akan memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki. Kebutuhan sandang, pangan dan papan dapat terpenuhi dengan bekerja. Dalam masyarakat, individu yang bekerja selain mendapatkan penghasilan dianggap memiliki kedudukan yang jelas dan dapat menjadi karakter tersendiri bagi individu tersebut (Fardila et al., 2014).

Demi keberlangsungan hidup maka setiap orang pasti membutuhkan uang sebagai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Sebagai imbalan yang didapatkan setelah bekerja maka uang dapat membawa manfaat bagi orang tersebut tetapi juga dapat merugikan apabila tidak dikelola dengan baik. Sehingga dengan adanya uang dapat menjadi alasan seseorang dalam memutuskan apakah uang tersebut dapat langsung digunakan atau akan dipergunakan pada masa yang akan datang dengan menyimpan uang tersebut terlebih dahulu (Handi & Mahastanti, 2012).

Dalam nyatanya seorang individu dapat menemukan bahwa tidak selamanya individu tersebut dapat bekerja. Menurut Biya dan Suarya (2016) dalam bekerja individu akan mengalami beberapa tahapan yakni tahapan pengembangan karir, penentuan karir, pemantapan karir, pembinaan karir dan memasuki tahapan terakhir yakni tahap kemunduran dimana individu tersebut akan memasuki fase tidak lagi bekerja karena telah memenuhi persyaratan tertentu yang mengharuskan individu tersebut untuk memasuki masa-masa

pensiun. Biasanya pada tahapan memasuki masa pensiun ini individu pada umumnya akan memiliki sikap yang berbeda. Terdapat tiga macam sikap yang dimiliki dalam menghadapi masa pensiun yakni menerima, terpaksa menerima dan menolak. Menurut Rakhmat dan Budiman pada Biya dan Suarya (2016) umumnya terdapat individu yang tidak mau mengakui masa dimana sudah diharuskan untuk pensiun sehingga melakukan penolakan hal ini karena individu tersebut memiliki kekhawatiran akan tidak terpenuhinya beberapa kebutuhan yang biasa didapatkannya ketika masih bekerja dan juga khawatir akan peran sosial di masyarakat, tidak mendapatkan kekuasaan, kontak sosial dengan masyarakat serta merasakan dimana harga diri individu tersebut akan menjadi rendah.

Menurut Sundjaja et.al (2015) ketika seorang individu memasuki masa pensiun maka perlu melakukan persiapan dengan baik terutama secara ekonomi atau finansial karena ketika pensiun penghasilan yang diperoleh mengalami penurunan sementara biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup tetap ada dan bisa saja mengalami peningkatan karena kenaikan harga kebutuhan setiap tahunnya. Selain itu, seiring dengan bertambahnya usia maka diperlukan biaya untuk memelihara kesehatan yang bisa saja mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya usia tersebut. Agar berbagai macam biaya dapat terpenuhi maka diperlukan sejumlah dana yang perlu dipersiapkan sejak jauh hari.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengatur tentang Batas Usia Pensiun (BUP) berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 menyatakan bahwa Batas Usia Pensiun (BUP) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pejabat Administrasi yakni 58 tahun, sedangkan usia pensiun untuk Pejabat Fungsional dan Pejabat Pimpinan Tinggi yakni saat mencapai usia 60 tahun. Menurut Lusardi dan Mitchell pada penelitian Wardani et.al (2019) mengatakan bahwa seorang individu yang bekerja memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup mereka pada masa pensiun. Tentunya hal tersebut berlaku bagi pekerja laki-laki maupun perempuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal tersebut membuktikan bahwa dirasa penting

untuk seorang individu melakukan persiapan dalam menghadapi masa pensiunnya.

Juen dan Sabri (2012) pada penelitiannya menyebutkan bahwa secara statistik di Malaysia usia harapan hidup wanita yakni 77,2 tahun dan pria 72,3 tahun dengan ini wanita Malaysia memiliki harapan hidup yang lebih lama dibandingkan dengan pria. Jika melihat batas usia wajib pensiun di Malaysia yakni 60 tahun maka rata-rata wanita Malaysia mampu bertahan hidup sekitar 17 tahun setelah masa pensiunnya, sedangkan pria sekitar 12 tahun. Apabila perencanaan pensiun tidak dilakukan dengan tepat maka masa pensiun selama 17 tahun bagi wanita dan 12 tahun bagi pria bisa menjadi hal yang perlu dikhawatirkan jika hanya bergantung pada penghasilan bulanan pensiun.

Di Indonesia Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) menurut provinsi dan jenis kelamin pada tahun 2019 di Provinsi Jambi tercatat bahwa angka harapan hidup perempuan mencapai 72,97 sedangkan laki-laki sebesar 69,11 dapat terlihat bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (BPS, 2019). Dengan adanya data tersebut dan dengan adanya Batas Usia Pensiun (BUP) di Indonesia yang mencapai 58 tahun maka hal ini berarti perempuan memiliki harapan hidup selama 14 tahun setelah pensiun, sedangkan laki-laki selama 11 tahun setelah pensiun. Hal tersebut juga dapat menjadikan dorongan bagi laki-laki maupun perempuan dalam mempersiapkan masa pensiun yang akan dihadapinya.

Menurut Shanmugam et.al (2018) dalam rangka mencapai kesiapan pensiun maka seorang individu perlu memiliki perencanaan dan melakukan persiapan pensiun dengan tepat. Individu yang bekerja dengan memiliki jumlah tabungan yang terbatas dinilai tidak mampu untuk menghadapi masa pensiun hal ini terkait dengan kualitas hidup yang buruk selama masa pensiun. Seorang individu harus bekerja untuk mencapai persiapan pensiun sehingga mampu menghadapi kehidupan setelah pensiun dengan percaya diri. Menurut Fardila et.al (2014) kesiapan pensiun merupakan suatu bentuk tindakan yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan aktivitas yang disebabkan oleh individu tersebut tidak lagi bekerja dan diwujudkan dalam bentuk penerimaan,

kesiagaan dan kesediaan individu tersebut dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Ismulcokro dan Sutarto (2008) juga menyebutkan bahwa kesiapan pensiun merupakan suatu tindakan yang dilakukan sejak awal terhadap persiapan-persiapan dalam menghadapi masa-masa pensiun terkait kesiapan fisik, kesiapan finansial dan kesiapan mental. Oleh sebab itu penting hal nya bagi seorang individu yang bekerja dan kemudian mengalami perubahan-perubahan aktivitas yang disebabkan karena individu tersebut tidak lagi bekerja untuk melakukan persiapan dan dapat memperhitungkan kebutuhan apa saja yang harus terpenuhi dalam menghadapi masa pensiun guna mewujudkan kehidupan yang nyaman dan sejahtera di hari tua karena dapat memenuhi segala macam kebutuhan.

Penelitian yang membahas tentang kesiapan pensiun telah dilakukan sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa literasi keuangan memiliki dampak positif terhadap kesiapan pensiun (Alessie et al., 2011). Peneliti lain Lusardi dan Mitchell (2017) juga menyatakan bahwa literasi keuangan dapat mempengaruhi kesiapan pensiun dimana individu dengan pengetahuan keuangan yang lebih maju cenderung lebih siap untuk pensiun. Penelitian lain yang membahas hal yang sama juga dilakukan oleh Sabri dan Juen (2014) mengemukakan bahwa kesiapan pensiun dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni literasi keuangan, perilaku menabung dan pengelolaan keuangan. Sementara itu Wardani et.al (2019) mendapat hasil bahwa literasi keuangan, penerapan pengelolaan keuangan dan perilaku menabung berpengaruh positif terhadap kesiapan pensiun. Dewi (2018) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa perencanaan dana pensiun dapat dipengaruhi oleh literasi keuangan, sikap terhadap dana pensiun dan gaya hidup.

Menurut Chen dan Volpe (1998) literasi keuangan merupakan suatu bentuk pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola keuangan serta pemahaman terkait tabungan, asuransi dan investasi. Menurut Wiharno (2015) literasi keuangan dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan dalam hal mengelola keuangan dan mampu melihat kondisi keuangan serta dapat menganalisis hal tersebut yang nantinya dapat berpengaruh terhadap

kesejahteraan. Tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh setiap individu akan memengaruhi pengelolaan keuangannya. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki maka semakin tinggi pula tingkat manajemen keuangan personal dan begitu pula sebaliknya (Wiharno, 2015).

Dengan adanya literasi keuangan maka seorang individu dapat membuat perencanaan terkait keputusan keuangan saat ini dan apa saja yang diperlukan dalam menghadapi masa depan. Seorang individu bisa saja melakukan pemborosan terhadap apa yang dimilikinya yang dapat berakibat pada kesulitan keuangan karena penghasilan yang didapat tidak dipergunakan dengan tepat. Kondisi keuangan yang terbatas tetapi diimbangi dengan adanya literasi keuangan maka seorang individu tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan karena telah melakukan perencanaan dan memperhitungkan kemungkinan yang terjadi menurut prioritas. Menurut Sobaya et.al (2016) pada kondisi nyatanya saat ini dapat ditemui bahwa seorang individu yang memiliki penghasilan lebih besar belum menjamin bahwa individu tersebut dapat menyisihkan penghasilannya untuk diinvestasikan atau disimpan untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki dibandingkan dengan individu yang memiliki penghasilan yang lebih rendah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat literasi keuangan di masyarakat. Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang ketiga dilakukan oleh OJK pada tahun 2019 dengan menggunakan indikator yang sama dengan survei yang dilakukan sebelumnya pada tahun 2016 yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku yang menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 38,03% sedangkan pada tahun 2016 mencapai 29,7% mengalami peningkatan sebesar 8,33%. Sehingga selama tiga tahun terakhir yakni dari 2016 sampai 2019 terjadi peningkatan literasi keuangan di masyarakat. Kemudian indeks literasi keuangan berdasarkan gender penduduk Indonesia menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki yakni sebesar 36.13% sedangkan laki-laki mencapai

39,94% sehingga tingkat literasi keuangan yang rendah pada perempuan akan menjadi hambatan dalam mengelola keuangan yang dimilikinya (OJK, 2019).

Dari survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 hanya terdapat 13 Provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan masyarakat diatas nilai rata-rata nasional. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan masyarakat dibawah rata-rata nasional. Dari hasil survei menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan rata-rata nasional sebesar 29,7% sedangkan indeks literasi keuangan provinsi Jambi mencapai 26,9% (OJK, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk di Provinsi Jambi hanya 27 orang yang memiliki pemahaman tentang keuangan dengan baik. Dari survei yang dilakukan oleh OJK tersebut dapat menggambarkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai keuangan masih belum merata pada seluruh provinsi.

Penelitian tentang literasi keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang dihubungkan dengan kesiapan pensiun (Alessie et al., 2011; Dewi, 2018; Lusardi & Mitchell, 2017; Sabri & Juen, 2014; Wardani et al., 2019) mengatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap kesiapan pensiun.

Terdapat hubungan antara gaya hidup dan kesiapan menghadapi pensiun. Dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Karlina (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi gaya hidup individu maka cenderung tidak merencanakan dana pensiun dan sebaliknya semakin rendah gaya hidup seorang individu maka individu tersebut akan merencanakan dana pensiun. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dimana semakin rendah gaya hidup yang dimiliki seorang individu maka semakin baik pula dalam merencanakan dana pensiunnya.

Sampai saat ini sepengetahuan penulis masih relatif sedikit penelitian yang menghubungkan antara variabel literasi keuangan dan gaya hidup sebagai variabel independent dengan kesiapan pensiun sehingga penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang menghubungkan antara literasi keuangan dan gaya hidup terhadap kesiapan pensiun.

Berdasarkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut LPP RRI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Radio Republik Indonesia sebagai satu-satunya radio yang menyandang nama negara yang siarannya bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan PP 11 tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik serta PP 12 Tahun 2005, RRI dinobatkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran yang dapat berjangkauan secara nasional dan dapat bekerja sama dengan siaran lembaga penyiaran asing. Dimana RRI memiliki 99 stasiun penyiaran yang salah satunya berada di provinsi jambi (RRI, 2020).

Berdasarkan survei awal dengan bendahara LPP RRI Jambi diperoleh data rata-rata gaji pegawai berdasarkan golongan dengan status kepegawaian PNS sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Gaji Induk dan Tunjangan Pegawai PNS

| No | Golongan | Gaji Induk (Rupiah) | Tunjangan (Rupiah) | Total (Rupiah) |
|----|----------|---------------------|--------------------|----------------|
| 1 | II C | 2.321.300 | 2.351.020 | 4.672.320 |
| 2 | III A | 3.385.700 | 2.399.000 | 5.784.700 |
| 3 | III B | 4.149.767 | 2.318.673 | 6.468.440 |
| 4 | III C | 4.373.600 | 2.231.070 | 6.604.670 |
| 5 | III D | 4.969.371 | 3.150.566 | 8.119.937 |
| 6 | IV A | 5.408.175 | 3.421.456 | 8.829.631 |
| 7 | IV B | 6.291.600 | 4.473.810 | 10.765.410 |
| 8 | IV C | 6.991.100 | 9.600.000 | 16.591.800 |

Sumber : LPP RRI Jambi, 2021

Menurut Kementerian Keuangan RI gaji induk merupakan gaji yang pembayarannya dilakukan tiap bulan secara rutin pada satuan kerja yang meliputi gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan kemahalan, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan khusus pajak, pembulatan

sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Berdasarkan tabel 1.1 didapatkan informasi bahwa golongan atau pangkat pegawai PNS LPP RRI Jambi dimulai dari golongan II C hingga golongan yang paling tinggi yakni IV C. Dimana tinggi dan rendahnya golongan tersebut akan menentukan besaran gaji dan tunjangan yang diperoleh oleh masing-masing pegawai tersebut. Total gaji induk dan tunjangan yang paling rendah yakni pada golongan II C dengan perolehan sebesar Rp. 4.672.320, sementara itu perolehan gaji dan tunjangan terbesar yakni pada golongan IV C dengan perolehan sebesar Rp. 16.591.800.

Tabel 1. 2

Gaji Induk dan Tunjangan Pegawai PBPNS

| No | Golongan | Gaji Induk (Rupiah) | Tunjangan (Rupiah) | Total (Rupiah) |
|----|----------|---------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 3 | 3.234.179 | 1.972.000 | 5.206.179 |
| 2 | 5 | 3.437.472 | 2.180.368 | 5.617.840 |
| 3 | 6 | 3.671.941 | 2.373.690 | 6.045.631 |

Sumber : LPP RRI Jambi, 2021

Berdasarkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa pegawai LPP RRI terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS). Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PBPNS adalah pegawai LPP RRI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI.

Berdasarkan tabel 1.2 di dapatkan informasi yakni golongan pegawai PBPNS dimulai dari golongan 3 dan yang paling tinggi yakni golongan 6. Total gaji dan tunjangan yang paling rendah yakni pada golongan 3 dengan perolehan Rp. 5.206.179, sedangkan gaji dan tunjangan terbesar diperoleh pada golongan 6 yakni sebesar Rp. 6.045.631.

Besaran gaji dan tunjangan yang diperoleh oleh pegawai LPP RRI Jambi dapat dikatakan besar sehingga diperlukan persiapan untuk menghadapi masa pensiunnya mengingat ketika pensiun nanti para pegawai tidak lagi mendapatkan penghasilan yang sama dan terjadi penurunan pendapatan karena tidak lagi memperoleh tunjangan seperti pada saat menjadi pegawai aktif. Dengan demikian untuk menciptakan rasa aman dan nyaman serta dapat menikmati masa pensiun maka masing-masing pegawai perlu mempersiapkan masa pensiunnya nanti.

Informasi yang diperoleh dari LPP RRI Jambi yakni dari total keseluruhan pegawai LPP RRI Jambi banyak pegawai yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2021 dan beberapa tahun kedepannya dengan telah mengajukan usulan pensiun pada tahun sebelumnya. Diantara pegawai tersebut telah memenuhi syarat untuk memasuki masa pensiun yakni telah berusia 58 tahun dan telah memberikan kinerja yang baik, bertanggung jawab atas tugasnya dan telah mengabdikan kepada negara selama masa kerjanya.

Berdasarkan survei awal dan fenomena yang terjadi diketahui bahwa sebagian besar pegawai LPP RRI Jambi mengalami peningkatan pendapatan yang salah satu penyebabnya adalah adanya tunjangan kinerja pegawai. Sehingga penting halnya untuk mengetahui tingkat pemahaman seorang individu pegawai dalam hal mengelola keuangan yang didapat agar tepat dalam mengambil keputusan keuangan dan untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan di masa depan termasuk dalam mempersiapkan masa pensiunnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan maka perlu dikaji lebih lanjut permasalahan terkait pengelolaan keuangan pegawai dalam mempersiapkan pensiun. Di dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan tersebut. Dilatarbelakangi semua hal-hal yang telah dibahas diatas, maka penulis tertarik dan memiliki motivasi untuk membahas lebih lanjut mengenai pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terkait persiapan memasuki masa pensiun dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup terhadap Kesiapan Pensiun Pegawai LPP RRI Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh antara literasi keuangan terhadap kesiapan pensiun pegawai LPP RRI Jambi?
2. Bagaimana pengaruh antara gaya hidup terhadap kesiapan pensiun pegawai LPP RRI Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hasil uji pengaruh antara literasi keuangan terhadap kesiapan pensiun pegawai LPP RRI Jambi.
2. Untuk mengetahui hasil uji pengaruh antara gaya hidup terhadap kesiapan pensiun pegawai LPP RRI Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

1. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk instansi terkait kesiapan pensiun para pegawainya, sehingga kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan karena para pegawai merasa sejahtera dan terjamin dihari tuanya.

2. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini maka penulis dapat menerapkan metode dan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dan dapat melihat suatu masalah yang ada dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca dan bisa menjadi referensi serta acuan untuk melakukan penelitian di bidang yang sama.